



**PENETAPAN**

**Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata, yang diajukan oleh :

**KACUNG DARUSSALAM BIN RANJI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.02 RW. 04 Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

**SUTINI LINAWATI BINTI HADI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.02 RW. 04 Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat - surat perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 23 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Januari 1990, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu,

Penetapan, Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 1 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 327/10/II/1990 tanggal 10 Januari 1990;

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I duda cerai, sedangkan Pemohon II janda cerai Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama M MUNIR FAJUDAN JAMIL umur 27 tahun 10 bulan, 2. LAILAT UNNURIYAH umur 17 tahun 8 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor 327/10/II/1990 tanggal 10 Januari 1990, tertulis Nama Pemohon I DARUSALAM BIN KANDJI Tempat Tanggal Lahir Tobo, 24 tahun dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Sumurgeneng, 23 th tetapi dalam Dokumen Pemohon Para Pemohon yang lain, seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan dikimen anak Para Pemohon yaitu Ijazah , tertulis Nama Pemohon I KACUNG DARUSSALAM BIN RANJI Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1970 sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I DARUSALAM BIN KANDJI Tempat Tanggal Lahir Tobo, 24 tahun dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Sumurgeneng, 23 th, Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan Dokumen anak Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon tersebut yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I KACUNG DARUSSALAM BIN**

Penetapan, Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 2 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RANJI Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1970**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan untuk mengurus persyaratan pendaftaran haji;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I DARUSALAM BIN KANDJI Tempat Tanggal Lahir Tobo, 24 tahun dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Sumurgeneng, 23 th** , sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 327/10//1990 tanggal 10 Januari 1990, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I KACUNG DARUSSALAM BIN RANJI Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1970**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan, Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 3 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/10/II/111990 Tanggal 10 Januari 1990 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523120107650087, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 09 Nopember 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523124107700059, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 09 Nopember 2012., Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3523121603061896, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Juli 2015, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3523-LT-23082013-0070, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 23 Agustus 2013 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

Penetapan, Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 4 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Ijazah, an. LAILATUNNURIYAH Nomor MTs-06 130034102 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, tanggal 28 Mei 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata An. KACUNG DARUSSALAM Nomor 145/186/414.415.11/2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Tanggal 08 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata An. SUTINI LINAWATI Nomor 145/229/414.415.11/2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Tanggal 16 Juni 2020.. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,

Penetapan, Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 5 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I tersebut adalah bahwa Pemohon I pada tanggal 10 Januari 1990 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama **SUTINI LINAWATI BINTI HADI** dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 327/10/II/1990 tanggal 10 Januari 1990, tertulis Nama Pemohon I **DARUSALAM BIN KANDJI** Tempat Tanggal Lahir Tobo, 24 tahun dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Sumurgeneng, 23 th tetapi dalam Dokumen Pemohon Para Pemohon yang lain, seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan dikimen anak Para Pemohon yaitu Ijazah , tertulis Nama Pemohon I **KACUNG DARUSSALAM BIN RANJI** Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir, **Tuban, 01 Juli 1970**, sehingga terjadi perbedaan, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus

Penetapan, Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 6 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa tertulis Nama Pemohon I KACUNG DARUSSALAM BIN RANJI Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1970;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2.P.3.P.4.dan P.5) haruslah menjadi rujukan, sehingga harus dianggap benar, bahwa tertulis Nama Pemohon I KACUNG DARUSSALAM BIN RANJI Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1970;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Penetapan, Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 7 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 327/10/II/1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal tanggal 10 Januari 1990, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I DARUSALAM BIN KANDJI Tempat Tanggal Lahir Tobo, 24 tahun dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Sumurgeneng, 23 th, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 327/10/II/1990 tanggal 10 Januari 1990, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I KACUNG DARUSSALAM BIN RANJI Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 01 Juli 1970;

Penetapan, Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 8 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 terdiri dari Drs. H. IRWANDI, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. MUHSIN, MH dan H. MUKHTAR, S.Ag, masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan 09 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu SUPRAYITNO, S.Ag. SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. MUHSIN, MH.

Drs.H.IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

H. MUKHTAR, S.Ag.

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO, S.Ag. SH,

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan, Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 9 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp	51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 367.500,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 10 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)